



Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Perempuan, Indeks Ketimpangan Gender, Upah Pekerja Perempuan, Jumlah Tenaga Kerja Perempuan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah

Syaiful Eka Adiwangsa^{1, *}, Maulidyah Indira Hasmarini²

^{1,2}Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Correspondence: E-mail: b300220175@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Perempuan (IPMP), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Upah Pekerja Perempuan (UPP), dan Jumlah Pekerja Perempuan (JPP) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada 35 kabupaten/kota periode 2020–2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder Badan Pusat Statistik (BPS) dengan metode regresi data panel dan model terpilih adalah Fixed Effects Model (FEM) berdasarkan Uji Chow dan Uji Haus-man. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Secara parsial, UPP dan JPP berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan IPMP dan IKG tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan upah dan penyerapan tenaga kerja perempuan berperan penting dalam menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah.

© 2026 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 18 Maret 2026

First Revised 18 Maret 2026

Accepted 18 Maret 2026

First Available online 19 Maret 2026

Publication Date 19 Maret 2026

Keyword:

Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia Perempuan, Indeks Ketimpangan Gender, Upah pekerja perempuan, Jumlah pekerja perempuan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi berbagai masalah sosial ekonomi, salah satunya adalah angka kemiskinan yang sangat tinggi. Kemiskinan dapat diukur berdasarkan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan sangat terlihat khususnya dalam aspek ekonomi. Secara global, berdasarkan World Economic Forum (2021), skor *Global Gender Gap Index* (GGI) menunjukkan kemunduran Indonesia dalam upaya untuk mengatasi ketimpangan gender yang berkontribusi terbesar penurunannya berasal dari aspek economic participation and opportunity..Padahal adanya perbaikan dalam ketimpangan gender diharapkan juga dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan khususnya dalam aspek ekonomi yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Fitriani et al., 2025).

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang dapat terjadi di mana saja, baik di negara maju maupun berkembang. Sebagai negara berkembang, kemiskinan merupakan salah satu isu besar di dalam perekonomian Indonesia, seolah-olah menjadi “pekerjaan rumah” yang belum dapat terselesaikan. Usaha pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan sebenarnya sudah ditempuh dengan berbagai cara, mulai dari program bantuan modal atau uang tunai kepada rakyat miskin sampai program transmigrasi. Di dalam Islam, kemiskinan dipandang sebagai masalah yang membahayakan jiwa dan iman seseorang karena sangat dekat dengan kekufuran. Dengan hidup miskin, seseorang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama secara maksimal, tidak dapat mengecap pendidikan yang baik, dan akses kehidupan dan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik secara agama, ilmu, maupun ekonomi (kesejahteraan) (Prasetyoningrum, 2018).

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi pada negara-negara dunia ketiga. Kemiskinan ditandai dengan rendahnya produktivitas dan rendahnya pendapatan yang diterima, keterbatasan akses dan kemampuan serta kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan. kemiskinan juga dapat diartikan sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan merupakan situasi dimana kurangnya pendapatan, kualitas akses kesehatan yang kurang, pendidikan yang rendah dan kepemilikan tempat tinggal yang kurang respresentatif atau bahkan tidak punya, dan kualitas lingkungan setempat yang buruk (Ahmad et al., 2025). Seperti yang terlihat pada gambar 1 berikut



Gambar 1. Total Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada tabel tersebut Kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2020–2021 berkaitan dengan melemahnya peran IPM, meningkatnya ketimpangan gender, turunnya upah, serta berkurangnya penyerapan tenaga kerja akibat pandemi COVID-19. Meskipun IPM relatif stabil, kualitas sumber daya manusia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena terbatasnya lapangan kerja. Nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) cenderung memburuk, terutama pada partisipasi ekonomi perempuan yang lebih rentan kehilangan pekerjaan. Selain itu, penurunan upah dan meningkatnya pengangguran menyebabkan daya beli rumah tangga menurun, sehingga mendorong kenaikan kemiskinan.

Sebaliknya, penurunan tingkat kemiskinan pada 2022–2023 terjadi seiring pemulihan ekonomi. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia mulai diikuti oleh perluasan kesempatan kerja, ketimpangan gender berangsur menurun, upah membaik, dan penyerapan tenaga kerja meningkat. Kondisi tersebut mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga dan pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan secara bertahap.

1.2. Tinjauan Pustaka

Tingkat Kemiskinan

Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis (Alviannor & Fahrati, 2021) .

Indeks Pembangunan Manusia Perempuan

Indeks Pembangunan Manusia Perempuan (IPMP) adalah salah satu standar terpenting yang mendasari model pembangunan suatu negara atau daerah dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan kalau IPM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan pembangunan daerah. Bersama dengan indikator pembangunan manusia lainnya, IPM merupakan komponen penting dalam pelaksanaan perencanaan dan kebijakan pembangunan tertentu. Tingkat kemiskinan daerah harus berkorelasi positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur pembangunan daerah. Dalam dunia yang ideal, orang yang tinggal di daerah dengan IPM tinggi memiliki kualitas hidup yang tinggi. Masyarakat dengan nilai IPM yang tinggi seharusnya memiliki tingkat kemiskinan yang rendah (Ramdhani et al.,2022).

Indeks Ketimpangan Gender

Berdasarkan Sitorus (2016) gender dijelaskan sebagai konsep dan peran dari laki-laki maupun perempuan yang tidak terikat pada perbedaan biologis, namun lebih kepada aspek sosial budaya, politik, serta ekonomi. Pada laki-laki dan Perempuan sejatinya memiliki perbedaan secara biologis, namun kebudayaan di masyarakat menafsirkan perbedaan biologis tersebut menciptakan tuntutan sosial dalam kepantasan berperilaku, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hak-hak, sumber daya, maupun kuasa. Walaupun ukuran kepantasan ini berbeda-beda tergantung budaya dalam masyarakatnya namun masih terdapat beberapa kemiripan, misalnya tentang mengurus anak/mengurus rumah yang identik dengan perempuan. Sedangkan ketika membicarakan tugas kemiliteran akan identik

pada pekerjaan laki-laki. Maka disebutlah diskriminasi ini sebagai ketimpangan gender, yang mana untuk mengubah ketidakadilan gender tersebut akan dibutuhkan waktu yang lama.

Upah Pekerja Perempuan

Upah, merupakan sesuatu (dalam bentuk uang) yang harus diserahkan oleh seseorang yang bertindak sebagai pemberi kerja kepada pihak penerima kerja, yang jumlahnya setara dengan hasil kinerja penerima kerja dalam pekerjaannya. Nilai dari sesuatu yang diberikan kepada penerima kerja tersebut, haruslah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antar keduanya (yakni pihak pemberi kerja dengan penerima kerja). Keberadaan upah ini, merupakan bentuk jaminan dari pihak pemberi kerja terhadap kelangsungan hidup penerima kerja serta keberlangsungan usahanya. Namun, dalam hal ini, pihak pemberi kerja dalam melangsungkan perjanjian mengenai upah terhadap pihak penerima kerja, tidaklah serta merta lepas dari pengawasan hukum (FirmanSyah, 2017).

Jumlah Pekerja Perempuan

Jumlah tenaga kerja manusia adalah jumlah individu perempuan yang melakukan segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun faedah suatu barang (Matondang, 2018).

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel pada penelitian ini meliputi Tingkat Kemiskinan (TK) sebagai variabel dependen, sedangkan Indeks Pembangunan manusia Perempuan (IPMP), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Upah Pekerja Perempuan (UPP), dan Jumlah Pekerja Perempuan (JPP) sebagai variabel independen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* pada penelitian ini yaitu 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah, sedangkan data *time series* yaitu tahun 2020-2023. Regresi data panel kemungkinan dapat menggunakan tiga estimasi, yaitu *Fixed Effects Model* (FEM), *Common Effects Model* (CEM), dan *Random Effects Model* (REM). Persamaan ekonometrika penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPMP_{it} + \beta_2 IKG_{it} + \beta_3 \log UPP_{it} + \beta_4 \log JPP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

TK	: Tingkat Kemiskinan (Persen)
IPMP	: Indeks Pembangunan Manusia Perempuan
IKG	: Indeks Ketimpangan Gender
UPP	: Upah Pekerja Perempuan (Rupiah)
JPP	: Jumlah Pekerja Perempuan (Orang)
β_0	: konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi masing-masing variabel independen
t	: Tahun 2020-2023
i	: 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

e : error term.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Estimasi pada model regresi data panel dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu *Common Effects Model* (CEM), *Fixed Effects Model* (FEM), dan *Random Effects Model* (REM). Hasil estimasi model data panel ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Regresi CEM, FEM, dan REM

Variabel	Koefisien Regresi		
	CEM	FEM	REM
C	88,47488	60,96647	44,08462
IKG	7,731225	0,452994	1,469822
IPMP	-0,172803	-0,013391	-0,039158
logJPP	0,548755	-2,627673	-0,611882
logUPP	-5,189640	-1,215578	-1,643290
R2	0,479	0,989	0,222
Prob F-statistik	0,000	0,000	0,000
Uji Chow			
Cross-section F(32,95) = 136,478; Prob. F = 0,0000			
Uji Hausman			
Cross-section random $\chi^2(4) = 35,454$; Prob $\chi^2 = 0,0000$			

Sumber: BPS, diolah

Setelah melakukan regresi CEM, FEM, dan REM, perlu dilakukan dua pengujian untuk menentukan model manakah yang terpilih untuk digunakan dalam mengestimasi data panel. Pertama, Uji Chow dilakukan untuk menentukan model yang terpilih antara CEM dan FEM. Kedua, Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model yang terpilih antara FEM dan REM.

Ketentuan dalam Uji Chow adalah apabila probabilitas F -statistik $< \alpha$, maka H_0 ditolak, yang artinya FEM adalah model yang terbaik untuk digunakan daripada CEM. Ketentuan dalam Uji Hausman adalah apabila probabilitas $\chi^2 < \alpha$, maka H_0 ditolak, sehingga FEM adalah model yang lebih tepat digunakan dibandingkan REM.

Tabel 2 menunjukkan probabilitas *Cross-section F* sebesar $0,0000 < \alpha$ (0,05). Dengan demikian, H_0 ditolak, sehingga FEM adalah model terbaik yang akan digunakan untuk mengestimasi data panel. Hasil Uji Hausman menunjukkan probabilitas χ^2 sebesar $0,0000 < \alpha$ (0,5), sehingga H_0 ditolak, yang berarti FEM adalah model yang lebih tepat digunakan.

Eksistensi model diuji melalui uji F , dengan H_0 yang menyatakan bahwa $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, yang berarti Indeks Pembangunan Manusia Perempaun, Indeks Ketimpangan Gender, Upah Pekerja Perempuan, Jumlah Pekerja Perempuan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. H_0 ditolak apabila probabilitas F -statistik kurang dari α .

Lalu, uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. H_0 menyatakan bahwa variabel independen ke- i tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. H_A menyatakan bahwa variabel independen ke- i berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. H_0 ditolak apabila probabilitas t -statistik kurang dari α . Berikut hasil regresi uji Fixed Effect Model yang terpilih, ditampilkan pada table 2 berikut :

Tabel 2. Hasil Regresi FEM

$$TKit = 60,96647 - 0,013391IPMPit + 0,452994IKG - 1,215578LogUPPit^{**} - 2,627673LogUPPit^{**}$$

$R^2 = 0,989$; F-stat = 235,283; Prob. F-stat = 0,000

Keterangan: *koefisien signifikan pada α 0,01; **koefisien signifikan pada α 0,05; ***koefisien signifikan pada α 0,1

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa nilai probabilitas F -statistik sebesar $0,000 < \alpha$ (0,05) yang berarti H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Perempuan, Indeks Ketimpangan Gender, Upah Pekerja Perempuan, Jumlah Pekerja Perempuan berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2023.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,989 yang berarti bahwa 98,9% variasi Tingkat Kemiskinan disebabkan oleh variasi bahwa Indeks Pembangunan Manusia Perempuan, Indeks Ketimpangan Gender, Upah Pekerja Perempuan, Jumlah Pekerja Perempuan. Sisanya yaitu sebesar 1,1% disebabkan oleh variasi variabel lain di luar model terestimasi. Hasil analisis uji T ditampilkan pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Hasil uji t

Variabel	Koefisien	Prob. t	Kesimpulan
IKG	0,452994	0,5078	β_1 tidak signifikan
IPMP	-0,013391	0,4407	β_2 tidak signifikan
LogUPP	-2,627673	0,0001	β_3 signifikan pada α 0,05
LogJPP	-1,215578	0,0030	β_4 signifikan pada α 0,05

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3 menunjukkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Pembangunan Manusia Perempuan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Sedangkan Upah Pekerja Perempuan dan Jumlah Pekerja Perempuan berpengaruh negative terhadap Tingkat Kemiskinan.

Pembahasan

Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia Perempuan dengan Tingkat Kemiskinan

Koefisien regresi variabel IPMP sebesar -0,013391 dengan pola hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia Perempuan dan Tingkat Kemiskinan adalah lin-lin dan tingkat signifikansi $0,5078 > 0,05$, yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Nurjannah & Yovita (2022) didalam penelitiannya mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2002-2021. Temuan serupa yang dilakukan oleh Lestari (2017) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan provinsi Lampung mulai dari tahun 2011 hingga 2015. Hasil penelitian dari Syaifullah & Malik (2017) juga menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN-4.

Hubungan antara Indeks Ketimpangan Gender dengan Tingkat Kemiskinan

Koefisien regresi variabel IKG sebesar 0,452994 dengan pola hubungan antara Indeks Ketimpangan Gender dan Tingkat Kemiskinan adalah lin-lin dan tingkat signifikansi $0,5078 >$

0,05, yang menunjukkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasil ini sejalan dengan penelitian Reky Oktavian Fikri & Agustina Suparyati (2017) menyatakan bahwa Variabel gender, yang diwakili oleh tingkatpekerjaan laki-laki dan perempuan, tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Amalia (2017) yang menyatakan bahwa perubahan ketimpangan gender tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Dalam penelitian Via Aprilia (2022) variabel ketimpangan gender tidak berpengaruh signifikan. Artinya, meningkatnya ketimpangan gender tidak akan berdampak pada kemiskinan di Indonesia. Ketidaksetaraan gender seringkali menyiratkan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan atau menikmati hasil pembangunan, karena mereka tidak membatasi pilihan mereka. Ketidaksetaraan gender juga mengurangi tekanan pada produktivitas, efisiensi dan pembangunan ekonomi. Ketidaksetaraan gender yang dapat membatasi kemampuan ekonomi untuk tumbuh dengan tidak menghilangkan sumber daya manusia di rumah dan di pasar tenaga kerja, dan dengan sistem yang mengecualikan perempuan atau laki-laki dari akses ke sumber daya, pekerjaan produktif atau layanan publik. Mengurangi kemampuan untuk menurunkan standar hidup.

Hubungan antara Upah Pekerja Perempuan dengan Tingkat Kemiskinan

Koefisien regresi variabel Upah Pekerja Perempuan sebesar $-2,627673$ dengan pola hubungan antara Upah Pekerja Perempuan dan Tingkat Kemiskinan K adalah lin-log dan tingkat signifikansi $0,0001 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa Upah Pekerja Perempuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Artinya, setiap kenaikan Upah Pekerja Perempuan sebesar satu persen akan menurunkan Tingkat kemiskinan sebesar $0,0262767$ persen. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Radityana et al. (2023) bahwa ada pengaruh negatif dan nyata antara membayar upah pekerja terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali, Temuan serupa yang dilakukan oleh Munarni et al. (2024) hasil uji hipotesis parsial diketahui bahwa upah pekerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) yang menjelaskan bahwa upah pekerja merupakan masalah pembangunan di tingkat kemiskinan dalam keterbatasan ketidakmampuan, dan kekurangan. Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan.

Hubungan Jumlah Pekerja Perempuan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Koefisien regresi variabel Jumlah Pekerja Perempuan sebesar $-1,215578$ dengan pola hubungan antara Jumlah Pekerja Perempuan dan Tingkat Kemiskinan adalah lin-log dan tingkat signifikansi $0,0030 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa Jumlah Pekerja Perempuan berpengaruh negatif dan signifikan Tingkat kemiskinan. Artinya setiap kenaikan jumlah pekerja Perempuan sebesar satu persen akan menurunkan Tingkat Kemiskinan sebesar $0,0121558$ persen. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Wiradyatmika & Sudiana (2013) , dimana dalam penelitiannya mereka menemukan salah satu hasil yang menyatakan bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Pamuji (2012) juga melakukan penelitian yang kaitannya dengan kemiskinan dengan menggunakan beberapa variabel yaitu pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja yang kaitannya dengan tingkat kemiskinan. Salah satu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja terserap dan pertumbuhan

ekonomi, memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia & Sugiharti (2022) jumlah tenaga kerja memiliki hubungan negatif dan signifikan mempengaruhi persentase penduduk miskin di Provinsi Bali, di mana tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jika dilihat dari sisi perekonomian, tenaga kerja akan membantu proses jalannya ekonomi secara langsung yaitu mulai dari produksi hingga konsumsi barang maupun jasa yang ada. Penambahan pada jumlah tenaga kerja maka akan mengakibatkan peningkatan pada perekonomian suatu wilayah maupun negara. Namun mungkin tenaga kerja bisa saja tidak mempengaruhi perekonomian karena adanya berbagai keterbatasan yang nantinya akan menyebabkan peningkatan kemiskinan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Perempuan (IPMP), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Upah Pekerja Perempuan (UPP), dan Jumlah Pekerja Perempuan (JPP) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada 35 kabupaten/kota selama periode 2020–2023 dengan menggunakan model regresi data panel. Berdasarkan hasil uji pemilihan model melalui Uji Chow dan Uji Hausman, model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effects Model* (FEM). Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,989 yang menunjukkan bahwa 98,9% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel dalam model. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Pekerja Perempuan (UPP) dan Jumlah Pekerja Perempuan (JPP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan upah serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja terbukti mampu menurunkan jumlah penduduk miskin melalui peningkatan pendapatan dan penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga. Temuan ini menegaskan bahwa dimensi ekonomi perempuan memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan di daerah. Sebaliknya, Indeks Pembangunan Manusia Perempuan (IPMP) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia perempuan dan perbaikan indikator ketimpangan gender belum secara langsung berdampak pada penurunan kemiskinan selama periode penelitian. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan perlu diiringi dengan perluasan kesempatan kerja dan akses ekonomi yang nyata agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor yang paling efektif dalam menekan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020–2023 adalah peningkatan upah pekerja perempuan dan perluasan penyerapan tenaga kerja perempuan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi perempuan melalui penciptaan lapangan kerja, perlindungan upah yang layak, serta peningkatan akses perempuan terhadap sektor produktif menjadi strategi yang relevan dan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

5. REFERENCES

Ahmad, A., Arham, M. A., & Djuuna, R. F. (2025). *Analisis Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo*. 05, 398–410.

- Alviannor, A., & Fahrati, E. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 75. <https://doi.org/10.20527/jiep.v4i1.3544>
- Amalia, A. (2017). PENGARUH PENDIDIKAN, PENGANGGURAN DAN KETIMPANGAN GENDER TERHADAP KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Aprilia, R., & Sugiharti, R. R. (2022). Pengaruh Pendidikan, Tenaga Kerja dan Kesehatan terhadap Kemiskinan (Studi Kasus pada Provinsi Bali). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 637–651.
- FirmanSyah, R. (2017). SISTEM UPAH MINIMUM KABUPATEN DALAM PERSPEKTI ISLAM (Studi Kasus Pada Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Terapan*. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ip ea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/
- Fitriani, S., Arham, M. A., Hadi, F., & Akib, Y. (2025). Benarkah Ketimpangan Gender Berkontribusi Terhadap Kemiskinan? Fakta Dari Indonesia. *Urnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(3), 436–442. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jsep>
- Lestari, R. P. (2017). ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENGANGGURAN, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2011-2015.
- Matondang, Z. (2018). Analisis Perbandingan Jumlah Usaha Industri Dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6(2), 150. <https://doi.org/10.24952/masharif.v6i2.1148>
- Munarni, V., Syarif, M., & Nusantara, A. W. (2024). PROVINSI SULAWESI TPENGARUH UPAH MINIMUM DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARAENGGARA. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 9(2012), 301–312.
- Nurjannah, L. S., & Yovita., I. (2022). ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2002-2021. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1).
- Pamuji, A. E. (2012). PENGARUH PENDIDIKAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, SERTA PENYERAPAN TENAGA KERJA TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/ KOTA DI JAWA TIMUR. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1, 11–26.
- Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663>
- Radityana, I. D. G. M., Djayastra, I. K., Danendra, A. A. N. B., & Wisnu, N. (2023). Pengaruh Upah Minimum , Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Manajemen Indonesia*, 1(1), 16–24.
- Ramdhani, N., Anggraeni, Y., & Desmawan, D. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan

- Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 136–144. <http://repository.radenintan.ac.id/9940/1/SKRIPSI 2.pdf>
- Reky Oktavian Fikri, & Agustina Suparyati. (2017). Pengaruh pendidikan, kesehatan dan gender terhadap tingkat kemiskinan di provinsi nusa tenggara timur. *Jurnal Media Ekonomi*, 25(1), 43–56.
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 10(2), 121–130. <https://doi.org/10.35906/je001.v10i2.785>
- Sitorus, A. V. Y. (2016). Dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. *Ejournal.Kemensos.Go.Id*, 89–101.
- Syaifullah, A., & Malik, N. (2017). PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI ASEAN-4 (Studi Pada 4 Negara ASEAN). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 107–119.
- Via Aprilia, M. T. (2022). Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender, Rasio Ketergantungan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(September), 43–50. [file:///C:/Users/Hilda/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/EYIZL5O7/Analisis_Pengaruh_Ketimpangan_Gender_Ras\[1\].pdf](file:///C:/Users/Hilda/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/EYIZL5O7/Analisis_Pengaruh_Ketimpangan_Gender_Ras[1].pdf)
- Wiradyatmika1, A. A. G. A., & Sudiana, I. K. (2013). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN BULELENG. *E-Jurnal EP Unud*, 344–349